

## Narasi Kontroversial Akun Instagram @aryawedakarna: Analisis Wacana Kritis dalam Gerakan “Sukla Satyagraha”

### Controversial Narrative of the Instagram Account @aryawedakarna: Analysis of Critical Discourse in the “Sukla Satyagraha” Movement

Pandu Hidayat<sup>1</sup>, Mawaidi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>1</sup>Penulis koresponden: mawaidi@uny.ac.id

#### Abstrak

Arya Wedakarna merupakan politisi yang cukup terkenal sekaligus kontroversial di Bali. Ia menggagas dan mengampanyekan gerakan yang diberi nama “Sukla Satyagraha”, sebuah program untuk menunjang perekonomian masyarakat Hindu di Bali. Penelitian ini bertujuan membongkar narasi kontroversial yang berhubungan dengan “Sukla”. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk melihat praktik sosial yang sedang berlangsung melalui dimensi teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Data penelitian ini berupa teks; kata, frasa, kalimat yang bersumber dari akun *Instagram* @aryawedakarna. Hasil analisis menunjukkan bahwa program Sukla yang digagas oleh Arya Wedakarna menghasilkan beberapa narasi perpecahan antaretnis-antaragama dan menghasilkan bagaimana wacana disebarkan dan dikonsumsi sehingga wacana tersebut terbentuk sebagai ideologi masyarakat, khususnya Bali.

Kata kunci: analisis wacana kritis; Fairclough; Sukla

#### Abstract

Arya Wedakarna is a well-known yet controversial politician in Bali. He initiated and campaigned for a movement called “Sukla Satyagraha,” a program aimed at supporting the economic well-being of the Hindu community in Bali. This study seeks to uncover the controversial narratives associated with “Sukla.” It employs Norman Fairclough’s critical discourse analysis to examine ongoing social practices through the dimensions of text, discourse practice, and sociocultural practice. The research data consists of textual elements—words, phrases, and sentences—sourced from the Instagram account @aryawedakarna. The analysis results indicate that the Sukla program initiated by Arya Wedakarna has generated narratives of ethnic and religious division and demonstrates how discourse is disseminated and consumed, ultimately shaping societal ideology, particularly in Bali.

Keywords: critical discourse analysis; Fairclough; Sukla

**Riwayat Artikel:** Diajukan: 5 Agustus 2024; Disetujui: 14 Agustus 2024

### 1. Pendahuluan

Media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Fenomena ini telah mengubah tata cara dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi (Bialy, 2017). Selain itu, media sosial juga memiliki peran yang signifikan dalam dunia politik. Penggunaan media sosial dalam politik telah menjadi bagian integral dari strategi politik, dengan politisi menggunakan platform ini untuk berkomunikasi dengan pemilih mereka sekaligus memengaruhi opini publik (Bradshaw & Howard, 2018; Irsyadi & Madamidola, 2023). Meskipun media sosial memberikan peluang untuk

menyebarkan pesan positif dan memobilisasi dukungan, namun hal ini juga membuka pintu bagi penyalahgunaan platform ini untuk menyebarkan kebencian dan intoleransi.

Beberapa politisi memanfaatkan media sosial untuk menggaungkan retorika bahasa yang mengandung konotasi kontroversial. Hal itu sebagai strategi yang efektif untuk memperkuat basis pemilih mereka atau mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih penting. Fenomena ini semakin menjadi perhatian karena dampak negatifnya dapat merembet ke dalam masyarakat dan memicu tindakan kekerasan yang bersumber dari produksi ujaran kebencian yang merujuk pada ekspresi ketidaksukaan, penghasutan, dan pemprovokasian yang berkaitan dengan suku, ras, dan agama (Musyafak & Ulama'i, 2019).

Bentuk ujaran kebencian yang lazim muncul di media sosial berupa penghinaan, menghasut, provokasi politik, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan penyebaran berita bohong (Paz et al., 2020; Ningrum et al., 2019; Sellars, 2016). Ujaran kebencian bertolak belakang dengan ekspresi kesantunan berbahasa yang seharusnya dilakukan oleh seorang figur publik. Tidak sedikit publik figur seperti politisi yang menggunakan cara-cara provokatif dalam kampanye politiknya. Teo (2000) menyebut salah satu bentuk ujaran kebencian yang berimplikasi pada konflik horizontal yaitu terbentuknya rasisme yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

Indonesia memiliki potensi perpecahan seperti yang dikhawatirkan Teo (2000) mengingat banyaknya suku, agama, dan bahkan warna kulit manusia-manusianya yang berbeda dapat dengan mudah dipakai sebagai strategi kampanye hitam. Semua akar konflik bangsa-bangsa di dunia dipicu oleh rasialitas (Sen, 2007). Ironisnya, banyak politisi menggunakan komunikasi politik yang buruk untuk mendapatkan simpati konstituennya. Salah satunya dengan cara menyebarkan narasi kontroversial berupa ujaran kebencian yang cenderung mudah mendapatkan perhatian publik lebih-lebih yang berhubungan dengan agama.

Tokoh politik Arya Wedakarna merupakan sosok yang kerap memberikan narasi-narasi kontroversial dengan konsentrasi kepada adat dan kebudayaan lokal Hindu (Sumiati, 2017). Pada skala nasional, nama Arya Wedakarna memang tidak sementेरeng politisi-politisi lain yang juga aktif di media sosial, seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Ruang lingkup pergerakan Arya Wedakarna hanya terbatas pada skala lokal, yaitu daerah Bali. Saat ini Wedakarna menjabat sebagai anggota DPD RI Provinsi Bali periode 2019–2024.

“Sukla Satyagraha” adalah program yang diinisiasi oleh Arya Wedakarna. Program ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014. Secara harfiah *Sukla* bagi masyarakat Bali bermakna bersih dan suci (Fhanny, Bandiyah, & Pramana, 2020; Jumari, 2017). Jika makanan yang layak dan baik dikonsumsi bagi umat Islam diberi label Halal, Sukla adalah label yang diberikan untuk makanan yang layak bagi masyarakat Hindu di Bali. Sederhananya, cikal bakal lahirnya program Sukla memang untuk menyaingi label “Halal” dalam Islam.

Dalam praktiknya, program Sukla Satyagraha didesain dengan tujuan mendorong perekonomian masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu (Dewi, Sucandrawati, & Laksmi, 2022; Creativany, Udayana, Remawa, 2020). Label “Sukla” ditempelkan pada setiap rumah makan dari pengusaha Hindu. Hal ini dilakukan untuk membedakan antara pengusaha Hindu dengan pengusaha non-Hindu. Akan tetapi, pada saat yang sama, Arya Wedakarna berupaya melemahkan sumber pendapatan para pendatang melalui program yang ia gagas tersebut.

Melalui narasi-narasi yang dibangunnya di media sosial, terdapat fenomena bahwa Arya Wedakarna dengan sadar memanfaatkan media sosial untuk menggaungkan narasi kontroversial melalui bahasa yang berkonotasi rasa benci terhadap masyarakat pendatang melalui program Sukla Satyagraha (Widiatmika & Sosiowati, 2024). Media sosial menjadi saluran ideal bagi Arya Wedakarna untuk menyebarkan narasi kontroversial. Dengan motif mempromosikan program Sukla, Arya Wedakarna memanfaatkan platform *Instagram* untuk menyebarkan pesan-pesan yang bersifat memecah belah, memicu ketegangan sosial, dan menghasut kebencian terhadap kelompok tertentu. Arya Wedakarna seringkali menggunakan narasi provokatif untuk mengekspresikan narasinya dan merendahkan kelompok tertentu. Fenomena ini tidak hanya memicu ketegangan sosial, tetapi juga menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, serta memperburuk polarisasi yang sudah ada.

Fenomena dalam narasi Arya Wedakarna merupakan bagian dari varian analisis wacana yang mendorong terciptanya argumentasi tandingan. Tidak hanya itu, wacana dalam konteks tersebut dijadikan praksis sosial yang dengannya dapat juga berfokus untuk menganalisis institusi, organisasi, relasi kelompok, struktur, hingga proses sosial-politik (Haryatmoko, 2017: 23). Analisis wacana kritis memadukan dan menjelaskan hubungan antara keduanya, termasuk struktur wacana dan struktur masyarakat. Dengan memperhitungkan proses semiosis itu, analisis wacana kritis menurut Fairclough, perlu memperhatikan tiga dimensi utama: (1) teks, (2) praktik diskursif, dan (3) praktik sosial.

Fairclough (2001) membagi ke dalam tiga jenis analisis berbeda, terkait dengan dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural. Pertama, dalam wilayah teks, deskripsi digunakan untuk melakukan analisis teks untuk mendapatkan gambaran bagaimana teks dipresentasikan. Pada tahap deskripsi ini, Fairclough juga menekankan pentingnya investigasi terhadap proses produksi teks yang mencakup konteks sosial kultural yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut. Kedua, interpretasi digunakan untuk menganalisis proses, yakni menginterpretasikan teks itu sendiri dan bagaimana teks dikonsumsi dan diinterpretasi pembaca. Dengan menggunakan representasi pola-pola tertentu dari tipe-tipe diskursus yang berbeda, penafsir dapat menentukan tipe diskursus yang sedang dianalisis dan tata wacananya. Adapun poin dari teks merupakan ringkasan atau topik dari teks tersebut. Ketiga, eksplanasi diorientasikan untuk menggambarkan diskursus sebagai bagian dari praktik sosial dan menunjukkan determinasinya terhadap struktur sosial dan efek reproduktifnya terhadap struktur-struktur tersebut, baik efeknya memapankan ataupun mengubah struktur. Struktur sosial yang menjadi fokus analisis adalah relasi kekuasaan. Fairclough menekankan dua hal yang harus dianalisis, yakni determinan berarti relasi kekuasaan yang menentukan diskursus dalam proses perjuangan sosial dan efek yang dihasilkan diskursus tersebut (Fairclough, 2001, p. 131).

Sosok Arya Wedakarna menjadi topik kajian ilmiah dalam sejumlah penelitian, salah satunya terkait dengan narasi kontroversial dalam wacana pembentukan wisata syariah (Sumiati, 2017) serta munculnya papan reklame yang di dalamnya terdapat bahasa yang mengandung ideologi tertentu, termasuk sukla, sebuah gerakan yang dipelopori oleh Arya Wedakarna (Widiatmika & Sosiowati, 2024). Penelitian yang terakhir tersebut memberi kontribusi awal yang memicu penelitian ini ke wilayah analisis wacana kritis, lebih spesifik melihat praktik sosial yang sedang berlangsung melalui dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural. Menurut Fairclough (2013), konteks sosial di luar media dapat memengaruhi suatu teks/berita atau wacana. Pengaruh konteks sosial terhadap proses produksi teks/berita tidak berhubungan langsung, tetapi dimediasi oleh praktik diskursif, yakni terkait dengan bagaimana suatu berita diproduksi dan bagaimana khalayak mengonsumsi dan menerima berita itu.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode dekonstruksi. Sumber data penelitian ini adalah akun *Instagram* @aryawedakarna. Pemilik akun media sosial ini memiliki gerakan yang

disebut “Sukla Satyagraha” yang digagas sendiri oleh pemilik akun tersebut yang bernama Arya Wedakarna, seorang anggota DPD RI Provinsi Bali.

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang didapatkan di antaranya adalah tulisan dan sejumlah gambar. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan konsep analisis wacana kritis Norman Fairclough. Pendekatan ini melibatkan tiga dimensi utama: analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural. Dimensi pertama, analisis teks merupakan suatu proses analisis data teks sebagai objek yang diteliti. Dimensi kedua, analisis praktik diskursif dilakukan untuk menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Dimensi ketiga, analisis praktik sosiokultural yang menggali konteks yang berhubungan dengan masyarakat, atau budaya, dan politik tertentu yang berpengaruh terhadap kehadiran teks.

Analisis data dikerjakan dengan cara membaca seluruh data yang berhubungan dengan Sukla Satyagraha. Selanjutnya melakukan pembacaan ulang dan memilah data-data yang mengandung narasi kontroversial. Bagian terakhir ini menjadi titik balik untuk memecahnya menjadi beberapa kategorisasi untuk mempermudah analisis.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Prefigurasi Naratif**

Tidak sedikit konflik-konflik besar di dunia berasal dari narasi yang mengandung perpecahan yang oleh Sen (2007) menyebut akar dari semua konflik-konflik tersebut sifatnya rasialitas. Penelitian Citron & Norton (2011) menemukan fakta kehadiran grup *Facebook* “Kill a Jew Day” yang dengan mudah merekrut anggota dari berbagai penjuru hanya untuk merealisasikan kemarahan publik. Sementara itu di *Youtube* narasi-narasi kebencian bermunculan dengan kata-kata kunci seperti “How to Kill Beaners”, “Execute the Gays”, dan “Murder Muslim Scum”.

Narasi-narasi tersebut dapat berupa teks verbal dan nonverbal, bahkan dalam bentuk multimedia yang sengaja dibentuk secara terstruktur serta sistematis untuk memecah belah bangsa. Di level ini, sebuah teks dimunculkan karena didorong oleh faktor-faktor tertentu, seperti kepentingan dalam politik. Akibatnya, makna sebuah teks tidak tunggal, tetapi perlu dibaca secara berlapis. Gejala ini dapat diidentifikasi melalui analisis wacana.

Eriyanto (2015 p. 286–287) mengungkapkan bahwa pada tahap ini, teks dianalisis secara linguistik dengan melihat kosakata, semantik, tata kalimat, koherensi, dan kohesivitas. Semua elemen tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah berikut ini. Pertama,

muatan ideologi yang terkandung di dalam sebuah teks. Kedua, yaitu relasi, merujuk pada analisis bagaimana konstruksi hubungan antara pembuat teks dengan pembaca dan bagaimana sebuah teks disampaikan. Ketiga, identitas, merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas pembuat teks dan pembaca, serta bagaimana personal dan identitas ini hendak ditampilkan.

Pada bagian ini, analisis bekerja dalam tiga unggahan akun *Instagram* @aryawedakarna tentang gerakan *Sukla Satyagraha* yang digagasnya. Berdasarkan berbagai alat kebahasaan yang digunakan dalam beberapa unggahan akun *Instagram* @aryawedakarna, muncul dua alat yang menandai adanya representasi kebencian antargolongan yang dilakukan Arya Wedakarna melalui gerakan *Sukla Satyagraha*, yaitu kosakata dan gramatika.



Gambar 1. Tangkap layar akun *Instagram* @aryawedakarna yang diunggah pada 20 Mei 2023

Pada Gambar 1, kata “SUKLA” menggunakan huruf kapital. Kata ini seolah ingin menyampaikan makna non-bahasa dengan tujuan meminta perhatian pembaca. Huruf kapital juga dapat dimaknai sebagai penekanan akan suatu hal. Sementara itu, keterangan “AWK konsisten makan diwarung SUKLA” menunjukkan bahwa Arya Wedakarna sebagai penggagas gerakan ini tetap pada pendiriannya yang menjadikan warung sukla sebagai prioritas. Tetapi, citra Arya Wedakarna sebagai penggagas gerakan Sukla tidak lebih dikenal jika dibandingkan dengan citranya sebagai seorang politisi. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat Bali lebih mengenal atau akrab dengan Arya Wedakarna sebagai seorang politisi alih-alih penggagas gerakan Sukla. Dengan demikian, penyertaan singkatan “AWK” di akhir



takarirnya yang merujuk pada namanya sendiri di dalam kalimat tersebut sesungguhnya memiliki maksud tertentu. Arya Wedakarna hendak menegaskan bahwa sebagai seorang politisi, seseorang yang telah memiliki pengaruh, ia ingin masyarakat Bali mengikuti apa yang selama ini ia lakukan. Sebagaimana dirinya, masyarakat Bali juga harus selalu menjadikan warung *Sukla* sebagai pilihan utama. Selain itu, kalimat tersebut juga bisa mengandung sebuah sindiran terhadap warung non-*Sukla*, dalam hal ini adalah warung muslim.

Pada keterangan “warung yang ada plangkiran” Arya Wedakarna ingin menunjukkan bahwa warung *Sukla* pasti ada plangkiran. Plangkiran berarti sarana persembahyangan bagi umat Hindu di Bali. Melalui unggahannya, Arya Wedakarna seolah ingin menyeru kepada masyarakat Hindu Bali supaya tidak salah memilih tempat. Sementara itu, pada keterangan “warung milik semeton BALI”, Arya Wedakarna merujuk pada sebuah makna persaudaraan bagi orang Bali bahwa dengan berbelanja di warung *Sukla* maka persaudaraan atau *semeton* Bali itu akan tetap terjaga. Masyarakat Bali diimbau untuk selalu dan harus mengutamakan “semeton” Bali.

Dilanjut dengan kalimat “Orang Bali Harus Bersatu NGGIH, jangan lupa Kasus Penistaan Nyepi 2023 beberapa waktu lalu” yang ditujukan untuk membangkitkan memori lama masyarakat Bali terkait dengan dua warga Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak yang diduga melakukan penistaan agama saat hari raya Nyepi. Akun *Instagram* @aryawedakarna juga mengunggah memori lama masyarakat Bali tersebut pada 20 Januari 2024 ([https://www.instagram.com/p/C2Tvwxfs\\_OR/?img\\_index=2](https://www.instagram.com/p/C2Tvwxfs_OR/?img_index=2)). Ditambah dengan redaksi bahasa yang memicu sentimen perpecahan sebagaimana yang dapat dilihat dalam teks: “hanya sesama Bali yang bisa ngajegang agama Hindu, BUKAN yang lain”. Menjadi hal yang menarik melihat Arya Wedakarna mengaitkan kegiatan ekonomi dengan agama. Hal ini memang dapat dipahami karena bagaimanapun istilah *Sukla* pada dasarnya diterapkan pada benda-benda yang akan dipakai untuk upacara keagamaan. Dengan demikian, unggahan ini menunjukkan bahwa dengan berbelanja di warung sesama Bali atau *semeton* Bali, terutama warung yang memiliki label *Sukla*, tidak hanya dapat merawat persaudaraan sesama Bali atau *semeton* Bali. Lebih dari itu, bagi Arya Wedakarna berbelanja di warung *Sukla* merupakan upaya untuk menegakkan (*ngajegang*) agama Hindu.



Gambar 2. Tangkap layar akun *Instagram* @aryawedakarna yang diunggah pada 29 Juli 2023

Narasi yang sama dengan Gambar 1 yaitu terjadi pada Gambar 2. Narasi ini cenderung mempertegas dibangunnya sentimen negatif terhadap sesama, dalam hal ini golongan pendatang yang juga kerap kali disebut oleh Arya Wedakarna sebagai *dauh tukad*. Kalimat “Mulai sekarang, rakyat Bali harus dukung keberadaan makanan dari BABI.” hadir dalam kerangka fungsi untuk memberikan sindiran di tengah-tengah keberadaan makanan halal yang berasal dari warung para pendatang di Bali yang notabene beragama Islam. Arya Wedakarna tentu menyadari bahwa golongan pendatang umumnya datang ke Bali membawa tujuan untuk mengadu nasib atau mencari nafkah, salah satunya dengan membuka warung. Dengan adanya redaksi: “Bali dijajah dari segi ekonomi. Sadarlah umat Hindu, agama dan budaya Bali akan bertahan jika ekonominya bergerak. Perbanyak warung Babi di seluruh pelosok, penuhi kantin-kantin di sekolah dan kantor pemerintah dan perusahaan dengan Babi GULING.”, semakin mempertegas maksud Arya Wedakarna untuk melancarkan sentimen yang dibungkus kekhawatiran atas maraknya warung-warung dari golongan pendatang.

Melalui redaksi tersebut, Arya Wedakarna dengan gamblang menganggap warung-warung dari golongan pendatang sebagai ancaman yang seolah-olah akan mengganggu, bahkan meruntuhkan perekonomian masyarakat Hindu di Bali. Terlebih lagi, dibanding dengan Gambar 1, Gambar 2 memiliki tujuan makna bahasa yang berbeda. Foto pada



Gambar 1 yang diunggah pada 20 Mei 2023 tidak semenarik foto pada Gambar 2 yang secara titimangsa diunggah dua bulan kemudian yakni pada 29 Juli 2023. Selain menyertakan foto bersama dengan penjual, akun *Instagram* @aryawedakarna menyertakan foto gerobak makanan yang memuat tulisan, “100% SUKLA”.

Pada unggahan mutakhir dari akun *Instagram* @aryawedakarna (Gambar 3), Arya Wedakarna membuat potongan takarir yang berbunyi, “Jangan sampai Bali dikuasai ekonomi radikal. Ingat, jika ekonomi Bali dikuasai, kelak budaya dan agama Hindu akan mereka gusur seperti pengalaman Pelecehan Nyepi di Sumber Klampok Buleleng.” Kasus pelecehan terhadap Hari Raya Nyepi yang terjadi di Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng melibatkan dua orang warga Desa Sumber Klampok. Kedua warga tersebut merupakan warga yang beragama Islam. Mereka berusaha memaksa melewati palang jalan tepat pada saat Hari Raya Nyepi berlangsung kendati telah dihadang dan dilarang oleh para pecalang yang memang sedang melaksanakan tugas menjaga ketertiban selama pelaksanaan ibadah Nyepi.

Dalam hubungannya dengan takarir tersebut, frasa “ekonomi radikal” merujuk kepada para pelaku ekonomi yang beragama Islam. Melalui redaksi tersebut, secara tidak langsung Arya Wedakarna menganggap bahwa para pelaku ekonomi yang beragama Islam hampir dapat dipastikan memiliki sifat-sifat negatif, di antaranya sifat radikal, yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Bali dapat merugikan dan menyebabkan lingkungan sosial menjadi tidak stabil. Sebagai upaya memperkuat dan mempertegas adanya klaim “ekonomi radikal” itu Arya Wedakarna merasa harus menyertakan kasus pelecehan Hari Raya Nyepi di Desa Sumber Klampok.

Penyertaan kasus tersebut, dalam hal ini, sebagai upaya membangkitkan kembali memori lama sebagaimana yang terdapat pada Gambar 1 dan para pelaku ekonomi yang beragama Islam sesungguhnya bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh dua warga Desa Sumber Klampok tersebut. Perilaku yang dianggap oleh Arya Wedakarna mengancam keberlangsungan perekonomian Bali dan pada gilirannya merusak tatanan budaya dan agama Hindu di Bali. Tujuan dari takarir pada unggahan Gambar 3 ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan maksud takarir Gambar 1. Selain memberikan pembelaan dan perlindungan bagi masyarakat asli Bali, khususnya penganut agama Hindu yang terjun ke dalam bidang ekonomi, takarir tersebut pada saat yang sama juga menyodorkan politik pecah belah terhadap masyarakat pendatang di Bali atau para pelaku ekonomi yang beragama Islam.



Gambar 3. Tangkap layar akun *Instagram* @aryawedakarna yang diunggah pada 27 Desember 2023

Kata kunci dalam setiap unggahan akun *Instagram* @aryawedakarna mengandung implikasi persatuan sekaligus perpecahan. Narasi-narasi yang dibangun perihal gerakan *Sukla* selalu didramatisasi sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi produk Halal yang dikeluarkan oleh MUI. Namun, pada kenyataannya narasi tersebut cenderung berangkat dari sentimen atas keberadaan golongan pendatang atau *dauh tukad* yang datang ke Bali untuk mencari nafkah. Sentimen tersebut dibangun atas dasar penilaian yang dilakukan oleh Arya Wedakarna, bahwa warung makan para pendatang muslim merupakan ancaman bagi keberlangsungan perekonomian masyarakat Hindu di Bali, khususnya para pelaku ekonomi. Perlawanan yang bertujuan mendapatkan empati kolektif ini selalu didasarkan pada agama (Hindu) dan etnis (Bali). Wacana yang demikian dibangun tidak hanya semata-mata dalam rangka membuat jenama baru kepada kuliner Bali. Lebih dari itu, wacana gerakan *Sukla Satyagraha* tersebut didorong oleh gairah politik praktis sosok Arya Wedakarna. Artinya, untuk mengalihkan perhatian konstituen atau publik luas, wacana tersebut perlu digaungkan mengingat masyarakat Indonesia mudah tersita perhatiannya narasi-narasi yang bersifat sentimental. Dengan itu pula dapat dikatakan bahwa setiap wacana yang dibangun niscaya bertujuan memberikan wacana tandingan pula.



Gambar 4. Tangkap layar akun *Instagram* @aryawedakarna yang diunggah pada 27 Desember 2023

Takarir pada Gambar 4 keterangan “Ingat yang bersih belum tentu diproses secara suci” merupakan sebuah sindiran kepada warung non-*Sukla*. Kalimat ini memiliki implikasi bahwa makanan di warung makan selain *Sukla* kebersihannya memang bisa dijamin, tetapi belum tentu terjamin kesuciannya karena tidak sesuai dengan ajaran dan nilai yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa makanan yang berasal dari warung yang tidak berlabel *Sukla* atau non-*Sukla* tidak baik untuk dikonsumsi karena kesuciannya diragukan. Indikasi ini ditegaskan lagi dengan adanya kalimat “Waspada! makanan yang leteh/cemer”.

Dalam bahasa Bali, kata *leteh* dapat diartikan sebagai ‘kotor, tidak suci’, dan ‘tercemar’. Tidak jauh berbeda dengan arti kata *leteh*, kata *cemer* juga memiliki arti ‘kotor’ dan ‘cemar’. Perbedaan kedua kata ini hanya terletak pada konteks penggunaannya. Kata *cemer* lebih khusus diperuntukkan dalam konteks upacara keagamaan bagi masyarakat Hindu di Bali. Dengan kata lain, *cemer* adalah sebuah keadaan saat seseorang sedang tercemar (baca: tidak suci). Keadaan ini menyebabkan orang yang bersangkutan tidak diperbolehkan memasuki tempat ibadah atau pura dan tidak diperkenankan melakukan berbagai upacara keagamaan dalam agama Hindu di Bali. Pada dasarnya konteks penggunaan kata *leteh* dan *cemer* ditujukan secara khusus kepada perempuan yang sedang mengalami haid atau datang bulan. Seorang perempuan yang sedang dalam keadaan tidak suci karena haid atau datang bulan memang sebaiknya tidak memasuki tempat ibadah dan

tidak diperbolehkan melakukan berbagai upacara keagamaan. Akan tetapi, kedua kata tersebut kemudian diperluas konteks penggunaannya oleh Arya Wedakarna melalui gerakan *Sukla Satyagraha*. Sebagaimana yang dapat diketahui, melalui gerakan yang digagasnya tersebut, penggunaan kata *leteh* dan *cemer* secara langsung ditujukan pada makanan yang berasal dari warung makan yang tidak berlabel *Sukla*, dalam hal ini warung makan para pendatang yang beragama Islam.

Dalam kaitannya dengan unggahan tersebut, Arya Wedakarna menghimbau kepada masyarakat Bali untuk tidak membeli makanan yang berasal dari warung yang tidak berlabel *Sukla*, yang secara implisit merujuk pada warung makan para pendatang muslim. Hal ini penting untuk dilakukan karena makanan yang berasal dari warung makan yang tidak berlabel *Sukla* adalah makanan yang dianggap *leteh* dan *cemer*. Dengan demikian, melalui unggahan ini Arya Wedakarna hendak mengemukakan maksud bahwa masyarakat Hindu di Bali bisa terjerumus dalam keadaan tidak suci hanya karena mengonsumsi makanan yang berasal dari warung makan para pendatang muslim. Membeli dan memakan dari warung makan para pendatang muslim menyebabkan masyarakat Hindu Bali tidak bisa memasuki tempat ibadah atau pura, dan dengan sendirinya tidak bisa mengikuti berbagai upacara keagamaan dalam agama Hindu. Unggahan akun *Instagram* @aryawedakarna sekaligus membuat kredo bahwa warung *Sukla* sudah pasti suci.

### 3.2 Konfigurasi Naratif

Hadirnya media sosial mengindikasikan bahwa sebuah teks bisa didapatkan dari mana saja. Media korporasi produser teks tidak lagi menjadi sebuah parameter utama, tetapi sebaliknya, pemproduksi teks adalah pihak yang berkuasa (Fairclough, 2013). Representasi kekuasaan selalu merujuk kepada negara berikut peranti-perantinya. Dalam perkembangannya, teks berpotensi disebar melalui selebritas, influencer, atau politisi. Pada akhirnya ketika suatu teks/berita yang seharusnya memberikan informasi/wawasan yang dibutuhkan masyarakat, kini tidak lagi dapat terpenuhi, sebab pada kenyataannya, suatu teks/berita tidak terlepas dari praktik-praktik diskursif untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Proses penyebaran wacana tentang “Sukla” pada akun *Instagram* @aryawedakarna umumnya dilakukan dengan cara membingkai fenomena tertentu. Fenomena yang kerap kali dimanfaatkan oleh Arya Wedakarna adalah dalam bentuk kunjungan ke sebuah warung

makan (lihat Gambar 1 sampai 4). Selain itu, produksi wacana “Sukla” juga terjadi dengan cara merespons fenomena yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik.



Gambar 5. Tangkap layar akun *Instagram* @aryawedakarna yang diunggah pada 3 Februari 2024

Gambar 5 menunjukkan bahwa produksi wacana oleh akun *Instagram* @aryawedakarna dilakukan dengan cara merespons kebijakan publik. Bentuk kebijakan publik yang direspons oleh Arya Wedakarna, yaitu kewajiban bagi pedagang kaki lima dan UMKM untuk mendapatkan sertifikat Halal. Sertifikasi Halal tersebut dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 (Fuadi et al., 2022). Sebagai figur publik, serta anggota DPD RI Bali, sosok Arya Wedakarna memiliki hak untuk merespons kebijakan tersebut.

Tabel 1. Skema, Kerangka, dan Skrip adalah teknik pemrosesan sebuah wacana (Sumber: Fairclough, 2001).

<b>Skema</b>	[Aktivitas] Berkunjung ke rumah makan yang terdaftar <i>Sukla Satyagraha</i> . [Aktivitas] Merespons kebijakan publik (MUI-UUD).
<b>Kerangka</b>	[Topik] Memihak kepada kelompok minoritas, dalam hal ini masyarakat Bali yang dominan memeluk agama Hindu.
<b>Skrip</b>	[Subjek] Arya Wedakarna, DPD RI Bali, Penjual Makanan [Relasi] Penyambung aspirasi rakyat, melawan dominasi. Lihat takarir Gambar 1–5.

Tabel 1. menunjukkan skema, kerangka, dan skrip yang diproduksi oleh produsen wacana. Arya Wedakarna mempunyai tim khusus yang mengelola beberapa akun media



sosial, termasuk Instagram. Hal tersebut memang umum terjadi di kalangan politisi kondang. Tetapi untuk Arya Wedakarna, jejak pengelola media sosialnya sangat mudah diketahui. Pertama, tampak di akhir takarir selalu ditambah keterangan “admin” yang diberi tanda kurung. Kedua, di setiap unggahan, akun Arya Wedakarna tidak pernah menggunakan kata ganti “aku” ataupun “saya” yang menandakan bahwa Arya Wedakarna sendirilah yang menggunakan akun tersebut. Meskipun akun *Instagram* @aryawedakarna dipegang oleh admin, hal ini tidak berarti menggugurkan persoalan bahwa produksi teks narasi kontroversial terpisah dengan pribadi Arya Wedakarna. Hal itu terlihat sebagai sebuah strategi politik komunikasi yang dijabarkan secara rinci pada bagian skrip; siapa subjek dari narasi tersebut dan hubungan antara wacana yang dibangun dengan keuntungan yang didapatkan.

Platform *Instagram* menjadi media yang digunakan oleh Arya Wedakarna dalam menyebarkan narasi-narasi kontroversial. Saat ini, akun dengan nama @aryawedakarna tersebut memiliki jumlah pengikut sebesar 236 ribu. Jumlah ini dapat dikatakan sebagai jumlah yang cukup besar untuk ukuran seorang politisi lokal seperti dirinya. Hal ini tidak terlalu mengherankan mengingat citra yang susah payah ia bangun selama ini sebagai pembela adat dan budaya Bali. Dengan demikian, Arya Wedakarna memiliki banyak pendukung di samping penentang yang juga tidak kalah banyak. Dengan jumlah pengikut yang relatif besar tersebut, Arya Wedakarna telah mengenggam modal penting di tangannya. Terlebih lagi, sebagai sosok yang sampai saat ini masih menjabat dan duduk di kursi DPD RI Bali, akun *Instagram* tersebut menjadi media yang tepat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Bali.

Ratusan ribu pengikut di platform *Instagram* memungkinkan Arya Wedakarna memperoleh simpati dengan cepat dan semakin memperkuat eksistensi Arya Wedakarna di hadapan konstituennya. Sosok pemilik akun *Instagram* @aryawedakarna tersebut memiliki ratusan ribu pengikut di platform *Instagram*. Sebagai anggota DPD RI Bali, modal tersebut menjadi salah satu andalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat di samping untuk mendapatkan eksistensi di hadapan konstituennya. Sosok Arya Wedakarna selama ini citranya dikenal sebagai politisi lokal. Pada skala nasional, citra dan namanya tenggelam oleh nama-nama politisi besar lainnya. Dengan pengikut sebanyak ratusan ribu dan mayoritas pengikutnya adalah masyarakat Bali, tidak mengherankan jika selalu mendapatkan dukungan berupa komentar dan beberapa riwayat unggahan yang telah

dibagikan. Hal itu didukung oleh wacana yang dibangun melalui isu-isu etnisitas, ekonomi, dan kesenjangan sosial.

Terkait dengan tingkat konsumsi teks, penelitian ini merujuk pada tanggapan masyarakat Bali secara umum terhadap pernyataan kontroversial Arya Wedakarna melalui akun *Instagram* @aryawedakarna. Dengan pengikut sebanyak ratusan ribu dan mayoritas masyarakat Bali, tidak mengherankan jika Arya Wedakarna selalu mendapatkan respons dan tanggapan yang riuh dari para pengikutnya. Respons tersebut cenderung berupa dukungan, terutama ketika Arya Wedakarna mengunggah konten yang berhubungan dengan program *Sukla Satyagraha*.

Pada unggahan Gambar 2 misalnya, mendapat respons sebanyak 1.385 disukai, 75 komentar, dan riwayat dibagikan sebanyak 57. Salah satu tanggapan berupa komentar dengan nada mendukung unggahan, datang dari akun @putuamarta\_ dengan redaksi “Luar biasa ajik”. Tidak hanya komentar dengan nada sinis atau provokatif terhadap golongan pendatang (*dauh tuukad*) juga dapat ditemukan pada unggahan tersebut. Hal itu diutarakan akun @sukmajaya.tech, sebagaimana yang dapat dilihat pada keterangan berikut ini. “Tolong di perketat warung anak Dauh Tukad yang buka 24 jam nike jik, trlalu menghancurkan pasaran dan selalu bising”.

Komentar-komentar tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Arya Wedakarna berhasil memperoleh pengikut yang selalu mengamini atau mendukung setiap tindakannya di akun *Instagram* miliknya, khususnya ketika memuat konten yang berhubungan dengan gerakan *Sukla Satyagraha*. Hal itu dapat dipandang sebagai hasil dari perjuangan yang selalu digalakkan oleh Arya Wedakarna melalui, salah satunya, gerakan *Sukla Satyagraha* tersebut. Bagaimanapun, melalui gerakan ini, Arya Wedakarna membangun kesan sebagai pembela hak-hak masyarakat Hindu di Bali, terutama bagi para pelaku ekonomi yang dinilai menjadi korban dari “penjajahan ekonomi” yang dilakukan oleh golongan *dauh tukad* atau para pendatang yang notabene beragama Islam.

Tindakan mempromosikan gerakan *Sukla Satyagraha* yang dilakukan oleh Arya Wedakarna melalui akun *Instagram* @aryawedakarna bukan berarti tidak memiliki dampak negatif sama sekali. Tanggapan berupa komentar yang dilakukan oleh akun bernama @sukmajaya.tech adalah bukti dari dampak negatif tersebut. Sebagaimana yang dapat dilihat pada keterangan di atas, akun tersebut memberikan komentar bernada sinis terhadap para pelaku ekonomi dari luar, yaitu para pendatang. Komentar dengan nada sinis tersebut mengindikasikan bahwa Arya Wedakarna telah berhasil menanamkan kecenderungan yang sama kepada para pengikutnya, yaitu kecenderungan untuk memandang para pelaku

ekonomi dari golongan pendatang sebagai ancaman bagi perekonomian masyarakat Hindu di Bali. Berbagai tanggapan yang muncul tersebut berkaitan dengan wacana-wacana yang dibangun melalui isu-isu etnisitas, ekonomi, dan kesenjangan sosial yang digaungkan Arya Wedakarna melalui akun *Instagram*-nya.

### 3.3 Refigurasi Naratif

Gerakan *Sukla Satyagraha* dibentuk sebagai protes terhadap pemerintah pusat akibat adanya kebijakan jaminan makanan halal bagi masyarakat muslim. Sosok Arya Wedakarna juga menolak ekonomi syariah dan moratorium bank syariah di Bali sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat Hindu (Fhanny et al., 2020; Widiatmika & Sosiowati, 2024). Hal senada diutarakan Jumari (2017) bahwa gerakan *Sukla* di Bali mengacu pada gerakan masyarakat Hindu Bali yang menolak penegakan hukum jaminan produk Halal dengan mempromosikan produk berlabel non-Halal seperti 'Sukla'. Hal itu dikenal sebagai Gerakan Ekonomi Satyagraha yang dipandang sebagai bentuk perlawanan ekonomi dan cara untuk menegakkan keyakinan mereka terhadap apa yang mereka anggap sebagai perlakuan yang tidak adil. Label *Sukla* melambangkan kemurnian dan digunakan oleh individu-individu Hindu Bali untuk membedakan produk mereka dengan produk lainnya. Hal itu merupakan manifestasi dari konflik sosial dalam masyarakat yang heterogen dan berpotensi menimbulkan intoleransi jika tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya penolakan ini, sosok Arya Wedakarna semakin dikenal sebagai politisi yang melawan dominasi. Gerakan-gerakan yang dicetuskan oleh Arya Wedakarna kerap kali menimbulkan kontroversi karena menciptakan konflik horizontal antarmasyarakat plural (Ifani et al., 2018).

Selain itu, gerakan yang digagas oleh Arya Wedakarna ini merupakan bentuk strategi untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat Hindu. Hal ini bermanfaat dan menjadi modal komunikasi politik yang baik pada akun *Instagram* @aryawedakarna untuk membenturkan isu agama dan ekonomi, mengingat adanya sentimental antara warga asli Bali dengan pendatang yang dinilai menjadi pesaing dalam kegiatan ekonomi. Bagian ini disampaikan secara terbuka pada Gambar 3 dengan redaksi: “Jangan sampai Bali dikuasai ekonomi radikal. Ingat, jika ekonomi Bali dikuasai, kelak budaya dan agama Hindu akan mereka gusur seperti pengalaman Pelecehan Nyepi di Sumber Klampok Buleleng.” Redaksi pada Gambar 3 jika dicacah ke dalam bentuk skrip sebagai berikut.

Tabel 2. Skrip atas wacana yang dibangun oleh akun *Instagram* @aryawedakarna

<b>Struktur</b>	<b>Wacana/Teks/Peristiwa</b>	<b>Interteks/Anteseden</b>
Skrip 1	Jangan sampai Bali dikuasai ekonomi radikal.	Kelompok radikal mengancam masyarakat Bali
Skrip 2	Ingat, jika ekonomi Bali dikuasai, kelak budaya dan agama Hindu akan mereka gusur	Kelompok radikal akan menggusur agama Hindu
Skrip 3	(mereka gusur) seperti pengalaman Pelecehan Nyepi di Sumber Klampok Buleleng.	Kelompok radikal adalah perusuh yang melecehkan perayaan agama umat Hindu.

Moghaddam (2024) menyatakan bahwa analisis wacana kritis Norman Fairclough berfokus pada bagaimana ideologi beroperasi dalam teks dan interaksi sosial. Fairclough menekankan pada reproduksi dan perlawanan terhadap kekuasaan melalui struktur bahasa dan sosial. Dalam pendekatannya, ideologi dilihat sebagai sesuatu yang tertanam dalam wacana, membentuk, dan merefleksikan dinamika kekuasaan di dalam masyarakat. Dengan menganalisis penggunaan bahasa dan praktik sosial, Fairclough bertujuan mengungkap bagaimana ideologi dikonstruksi, dipertahankan, dan ditantang dalam konteks yang berbeda. Melalui kerangka kerjanya, Fairclough memberikan wawasan tentang bagaimana hubungan kekuasaan dilanggengkan, diperebutkan melalui wacana, dan menyoroti kompleksitas formasi ideologi dalam masyarakat kontemporer. Menurut Fairclough (2013) ideologi menginvestasikan bahasa dalam berbagai cara di berbagai tingkatan. Masalah utamanya terletak pada persoalan apakah ideologi merupakan properti struktur atau properti peristiwa, dan jawabannya adalah keduanya. Dalam pembentukan wacana, pada saat yang bersamaan struktur juga dibuat sehingga menghasilkan konteks di luar teks (interteks).

Masyarakat Bali yang terepresentasi melalui akun *Instagram* @aryawedakarna menemukan “lokasi ideologi” yang dapat memuaskan dialektika struktur dan peristiwa di sekitar mereka. Tabel 2 hanyalah satu dari sekian cara untuk melihat bagaimana ideologi dibentuk di dalam masyarakat sehingga menimbulkan perspektif yang sama. Menurut Fairclough (2013), ideologi muncul dalam masyarakat yang ditandai adanya hubungan dominasi dan sejauh mana ideologi tersebut mampu melampaui cara berpikir masyarakat. Konsep-konsep tersebut dinamakan sebagai cara kerja praktik sosiokultural, yaitu ketika

kekuatan-kekuatan dalam masyarakat berpengaruh dalam memaknai dan menyebarkan ideologi di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya sendiri atau bahkan lebih luas lagi dan berpotensi membentuk dan mengubah tatanan sosial yang lebih jauh lagi.

Eriyanto (2015: 288) mengungkapkan bahwa praktik sosiokultural (*socio-cultural practice*) adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Konteks di sini memasukkan banyak hal, seperti konteks situasi dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu. Konteks ini dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang atau berpengaruh pada masyarakat Bali, tempat sosiokultural wacana diproduksi.

#### 4. Simpulan

Media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kiwari. Bahkan, di hadapan media sosial, masyarakat nyata saling berganti ke luar masuk realitas-virtual; semuanya berbondong-bondong beralih rumah ke media sosial masing-masing. Tetapi, di dalam realitas virtual tersebut interaksi diwakili oleh bahasa ketika pemilik bahasa adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Selain kekuasaan identik dengan kekayaan, kekuasaan identik juga dengan pemilik wacana yang dihasilkan dari bahasa.

Setiap “bahasa” yang diproduksi perlu dicurigai. Lebih-lebih “bahasa” yang diproduksi pemilik kepentingan yang sedang membutuhkan perhatian publik. Oleh penguasa, “bahasa” juga kerap kali digunakan sebagai alat untuk menggiring opini publik dengan berbagai tujuan yang menguntungkan pihak tertentu. Setiap “bahasa” mengandung ideologi dan karena itu tidak ada sebuah teks yang bisa dibiarkan berdiri sendiri tanpa konteks yang melatarbelakanginya.

Akun *Instagram* @aryawedakarna sebagai figur publik kerap kali menimbulkan narasi kontroversial. Pilihan bahasa yang diproduksi kerap kali memakai cara politik belah bambu; satu diangkat satu diinjak, dalam hal ini ketika akun *Instagram* @aryawedakarna membicarakan gerakan Sukla Satyagraha. Narasi-narasi kontroversial tersebut sering kali berujung kepada ujaran kebencian khususnya di tingkatan masyarakat kelas bawah.

#### Daftar Pustaka

- Biały, B. (2017). Social Media—From Social Exchange to Battlefield. *The Cyber Defense Review*, 2(2), 69–90. <http://www.jstor.org/stable/26267344>
- Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2018). The Global Organization of Social Media Disinformation Campaigns. *Journal of International Affairs*, 71(1.5), 23–32.



<https://www.jstor.org/stable/26508115>

Citron, D.K & Norton, H.L. (2011). Intermediaries and Hate Speech: Fostering Digital Citizenship for Our Information Age. *Boston University Law Review* (91). <https://ssrn.com/abstract=1764004>

Creativany, M.A, Udayana, A.G.B, & Remawa, A.A.G.R. (2020). Kajian Estetika, Fungsi dan Makna Logo Sukla Satyagraha di Denpasar. *Prabangkara : Jurnal Seni Rupa dan Desain*, 24(2), 64–72. Retrieved from <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/prabangkara/article/view/1216>

Dewi, D.A, Sucandrawati, N.L.K.A.S, & Laksmi, N.P.A.D. (2022). Pengaruh Digital Marketing dan Brand Awareness terhadap Pembelian Produk Makanan Sukla pada UMKM Satyagraha di Kota Denpasar. *Nusantara Hasana Journal*, 2(3), 179–195. Retrieved from <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/463>

Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.

Fairclough, Norman. (2001). *Language and Power*. England: Pearson Educated Limited.

Fairclough, Norman. (2013). *Critical Discourse Analysis The Critical Study of Language (Second edition)*. New York: Routledge.

Fhanny, P., Bandiyah, B., & Pramana, G. (2020). Populisme Arya Wedakarna Sebagai DPD RI Dapil Bali. *Jurnal Nawala Politika*, 1(2). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/62137>

Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>

Haryatmoko. (2017). *Critical Discourse Analisis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.

Ifani, I., et al., (2018). *Dinamika Toleransi dalam Mayoritarianisme Agama di Tingkat Lokal*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Irsyadi, A. N., & Madamidola, O. (2023). Media in the Cultural Dissemination: A Study of Cultural Filming on YouTube. *Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal*, 2(2), 308 - 322. <https://doi.org/10.21009/Arif.022.07>

Jumari. (2017). “Gerakan Ekonomi Satyagraha Hindu Bali Melalui Labelisasi Non-Halal Sukla: (Antara Kebangkitan Militansi dan Ancaman Benih Intoleransi)” dalam *PROCEEDINGS 1<sup>st</sup> Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) Kopertais Wilayah IV Surabaya*. Surabaya: Kopertais4 Press. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeri%201.33>

Musyafak, N., & Ulama'i, A. (2019). Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(2), 166-182. doi:<https://doi.org/10.21580/jid.v39.2.4673>

Moghaddam, K. A. (2024). Critical Discourse Analysis: A review of the views of Ernesto

- Laclau, Chantal Mouffe and Norman Fairclough. 1(2):86-90. doi: 10.63053/ijrel.16
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2019). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Paz, M. A., Montero-Díaz, J., & Moreno-Delgado, A. (2020). Hate Speech: A Systematized Review. *Sage Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020973022>
- Saraswati, A. Sarini, Ni Wayan. (2017). *Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough*. Mozaik Humaira. Vol. 17 (2):181-191.
- Sellars, A. (2016). Defining Hate Speech. *Berkman Klein Center Research Publication*, (20), 16-48. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2882244>
- Sen, A. (2007). *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas*. Diterjemah oleh Arif Susanto. Serpong: Marjin Kiri.
- Sumiati, D. (2017). Intercultural Communication Based on Local Wisdom That Made the People of Bali Reject Sharia Tourism. *Asian Journal of Media and Communication*, 1(2), 137–146. <https://doi.org/10.20885/asjmc.vol1.iss2.art4>
- Supriatma, Made. (2020). *Arya Wedakarna: “Raja” dan Politisi Populis Pulau Bali*. Dapat diakses pada lama: <https://tirto.id/arya-wedakarna-raja-dan-politisi-populis-pulau-bali-fQoU>
- Teo, P. (2000). Racism in the News: A Critical Discourse Analysis of News Reporting in Two Australian Newspapers. *Discourse & Society*, 11(1), 7-49. <https://doi.org/10.1177/0957926500011001002>
- Valenza, J. K., Boyer, B. L., & Curtis, D. (2014). *Social Media Curation*. Chicago: American Library Association.
- Widiatmika, P. & Sosiowati, I. (2024). Ideologies in Outdoor Public Signs in Bali: A Critical Pragmatic and Linguistic Landscape Study. *LingTera*, 11(1), 25-38. doi:<https://doi.org/10.21831/lt.v11i1.68427>